

BAB III

TINJAUAN TEORETIS TENTANG ILMU POLITIK

A. Pengertian Politik

Secara *Epistimologis* politik berasal dari bahasa Yunani “*Polis*”, “*Polites*” (warga negara), “*Politikos*” (kewarganegaraan), “*Politike te Ekne*” (kemahiran politik), “*Politike Episteme*” (ilmu politik).

Dalam bahasa Arab Politik biasanya diwakili oleh kata *al-siyasah*¹ dan *daulah*, walaupun kata-kata tersebut dan kata-kata lainnya yang berkaitan dengan politik seperti keadilan, musyawarah, pada mulanya bukan ditujukan pada masalah politik. Kata *siyasah* dijumpai dalam bidang kajian hukum, yaitu ketika berbicara masalah *imamah*, sehingga dalam fiqih dikenal adanya bahasan *fiqih siyasah*. Demikian pula kata *daulah* pada mulanya dalam Al-Qur’an digunakan untuk kasus penguasaan harta dikalangan orang-orang kaya, yaitu bahwa dengan zakat diharapkan harta tersebut tidak hanya berputar pada tangan-tangan orang kaya. Karena menurut sifatnya harta tersebut harus

¹ Kata *siyasat* berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus *Al-Munjid* dan *Lisan al-‘Arab* berarti mengatur, mengurus dan memerintah. *Siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Lihat J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 22-23.

mengalir atau berputar, dan tidak hanya dikuasai oleh orang-orang yang kaya (*daulatun baina agniya*), kata *daulah* tersebut juga digunakan untuk masalah politik yang sifatnya berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain.

Dalam sistem politik Islam, Allah telah memerintahkan agar manusia menerima segala perintah dan larangan Rasulullah S.A.W. Manusia diwajibkan tunduk kepada perintah-perintah Rasulullah S.A.W dan tidak mengambil selain daripada Rasulullah S.A.W untuk menjadi hakim dalam segala perselisihan yang terjadi di antara mereka. Firman Allah SWT:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya”. (Q.S Al-Hasyr: 7)²

² Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Al-Bantani dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pemerintah Provinsi Banten, 2014) h. 546.

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْٓ أَنفُسِهِمْ
 حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”. (An-Nisa’: 65)³

Rasulullah SAW sendiri menggunakan kata politik (*siyasah*) dalam sabdanya: “Adalah Bani Israil, mereka diurus urusannya oleh para nabi (*tasusuhumul anbiya*). Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantikannya. Tidak ada nabi setelahku, namun akan ada banyak para khalifah”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Teranglah bahwa politik berarti atau *siyasah* itu makna awalnya ialah mengurus urusan masyarakat. Berkecimpung dalam politik berarti memperhatikan kondisi kaum muslimin dengan cara menghilangkan kezhaliman penguasa pada kaum muslimin dan melenyapkan kejahatan.

Secara Terminologis ilmu politik memiliki 2 pengertian, yaitu :

1. Merujuk kepada satu segi kehidupan manusia dalam bermasyarakat yang lebih mengarah pada usaha untuk memperoleh kekuasaan, memperbesar atau memperluas serta mempertahankan kekuasaan.

³ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur’an Al-Bantani dan Terjemahnya*,, h. 88.

2. Merujuk kepada satu rangkaian tujuan yang hendak dicapai, atau cara-cara atau arah kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan yang lebih mengarah kepada kebijakan atau kebijaksanaan.

Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau *politics* atau kopolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik.⁴ Menurut Peter Merlk “politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan”. Secara umum politik (*politics*) adalah untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis.⁵ Dalam rangka ini politik pada dasarnya dapat dilihat sebagai usaha penyelesaian konflik (*conflict resolution*) atau konsesus (*consensus*). Peter Merlk juga merumuskan “Politik dalam bentuk yang paling buruk adalah perebutan kekuasaan, kedudukan dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri (*Politics at its worst is a selfishgrab for power, glory and riches*)”.

Ilmu Politik merupakan ilmu yang mempelajari suatu segi khusus dari kehidupan masyarakat yang menyangkut soal kekuasaan. Secara umum ilmu politik ilmu yang mengkaji tentang hubungan

⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi Cetakan Ketiga, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 13.

⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar ilmu Politik* ,, h. 15.

kekuasaan, baik sesama warga Negara, antar warga Negara dan Negara, maupun hubungan sesama Negara. Secara singkat politik adalah perebutan kekuasaan, tahta dan harta. Berikut ini beberapa definisi politik yang berkaitan dengan masalah konflik dan konsensus.

1. Menurut Rod Hague et al.: “Politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya (*Politics is the activity by which groups reach binding collective decisions through attempting to reconcile differences among their members*).⁶
2. Menurut Andrew Heywood: “Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama (*Politics is the activity through which a people make, preserve and amend the general rules under which they live and as*

⁶ Dikutip dalam buku Miriam Budiardjo “*Dasar-dasar Ilmu Politik*”, h. 16 dari buku Rod Hague et al., *Comparative Government and Politics* (London: Macmillan Press, 1998), h.3.

*such is inextricably linked to the phenomen of conflict and cooperation).*⁷

Ilmu politik juga memiliki ruang lingkup yang beragam.

Keberagaman ruang lingkup ilmu politik di antaranya :

1. Teori Politik
2. Lembaga-Lembaga Politik
3. Partai-partai, golongan (groups), dan pendapatan umum
4. Hubungan Internasional

Para sarjana cenderung untuk menekankan salah satu saja dari konsep-konsep ini, akan tetapi selalu sadar akan pentingnya konsep-konsep lainnya. Dengan demikian kita sampai pada kesimpulan bahwa politik dalam suatu negara (state) berkaitan dengan masalah kekuasaan (power) pengambilan keputusan (decision marketing), kebijakan publik (public policy), dan alokasi atau distribusi (allocation or distribution).⁸ Politik adalah perilaku dasar kehidupan manusia. Politik juga adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat berwujud proses pembuatan keputusan (*decision making*) khususnya dalam Negara.

⁷ Dikutip dalam buku Miriam Budiardjo “*Dasar-dasar Ilmu Politik*”, h. 16 dari buku Andrew Heywood., *Politics* (London: Macmillan Press, 1997), h.4.

⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi Cetakan Ketiga, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 14.

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (politics) adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Usaha menggapai *the good life* ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem, serta cara-cara melaksanakan tujuan itu. Masyarakat mengambil keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu dan hal ini menyangkut pilihan antara beberapa alternative serta urutan prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan itu. Berikut ini ada beberapa definisi.⁹ Ruang lingkup disiplin ilmu politik kontemporer sangat luas. Menurut O'leary subbidang utama dari penyelidikan ilmu politik meliputi: 1) Pemikiran Politik, 2) Teori Politik, 3) Lembaga-lembaga Politik, 4) Sejarah Politik, 5) Politik Perbandingan, 6) Ekonomi Politik, 7) Administrasi Publik dan Kebijakan Umum, 8) Teori Kenegaraan, dan 9) Hubungan Internasional¹⁰.

⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, h.15.

¹⁰ Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, cet. Ke-2, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009). H. 492-494.

B. Teori Politik

Teori merupakan generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena. Dalam menyusun generalisasi itu teori selalu memakai konsep-konsep. Konsep itu lahir dalam pikiran manusia dan karena itu bersifat abstrak, sekalipun fakta-fakta dapat dipakai sebagai batu loncatan.

Teori politik memiliki dua makna: makna pertama menunjuk teori sebagai pemikiran spekulatif tentang bentuk dan tata cara pengaturan masyarakat yang ideal, makna kedua menunjuk pada kajian sistematis tentang segala kegiatan dalam masyarakat untuk hidup dalam kebersamaan.¹¹ Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari phenomena yang bersifat politik. Dengan perkataan lain teori politik adalah bahasan dan renungan atas: a) tujuan dari kegiatan politik, b) cara-cara mencapai tujuan itu, c) kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu, dan d) kewajiban-kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik itu¹². Dalam konteks memahami politik, yang perlu dipahami ialah mengenai kekuasaan politik, legitimasi, system politik, perilaku politik,

¹¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_politik (diakses pada 01 November 2017, pukul 19:09 WIB)

¹² Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, h. 30.

partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk beluk partai politik. Teori politik juga tidak lepas dari pelaksanaan politik, teori politik merupakan kegiatan mengenai konsep penentuan tujuan politik, bagaimana mencapai tujuan tersebut serta segala konsekoennya. Dalam teori politik ada beberapa bahasan, antara lain filsafat politik, konsep tentang sistem politik, negara, masyarakat, kedaulatan, kekuasaan, legitimasi, lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, perbandingan politik, dsb.

Secara teoretis, ilmu politik terbagi atas dua, yaitu :

1. Valuational artinya ilmu politik berdasarkan moral dan norma politik. Teori valuational ini terdiri dari filsafat politik, ideologi dan politik sistematis.
2. Non valuational artinya ilmu politik hanya sekedar mendeskripsikan dan mengkomparasikan satu peristiwa dengan peristiwa lain tanpa mengaitkannya dengan moral atau norma.

Terdapat tiga bentuk penteorian dalam ilmu politik, yakni diantaranya ialah: teori politik empiris, teori politik formal, dan teori politik normatif.¹³

¹³ Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*,, h. 581-582.

1. Teori Politik Empiris

Biasanya digunakan untuk mengacu kepada bagian-bagian teoritis ilmu politik. Para ahli ilmu politik tertarik dalam menjelaskan peristiwa-peristiwa politik tertentu, sekaligus tertarik dalam mengembangkan teori-teori yang lebih luas dalam satu payung politik.

2. Teori Politik Formal

Merupakan teori politik yang kadang-kadang dirasakan tumpang tindih dengan teori-teori social maupun teori-teori pilihan publik. Istilah ini meminjam dari gagasan ilmu ekonomi tentang pelaku-pelaku rasional yang berusaha mencapai tujuan-tujuannya, kemudian mencoba mengembangkan model system politik dan seolah-olah mereka tersusun dari pelaku-pelaku dalam berbagai peran politik (politisi, birokrat, pemilih, dan lain-lain)

3. Teori Politik Normatif

Merupakan teori politik yang tetap paling dekat dengan enterprise tradisional, sejauh ia berkenaan dengan justifikasi institusi dan kebijakan politik. Tujuannya adalah meletakkan prinsip-prinsip otoritas, kebebasan, keadilan dan lain-lain.

Kemudian mengkhususkan pada tatanan social macam apa yang paling memadai untuk memenuhi prinsip-prinsip tersebut.

C. Aspek-aspek dalam Ilmu Politik

Ilmu Politik mempelajari beberapa aspek, diantaranya sebagai berikut :

1. Aspek kenegaraan

Ilmu yang mempelajari negara, tujuan negara, dan lembaga-lembaga negara serta hubungan negara dengan warga negaranya dan hubungan antar negara.

2. Aspek kekuasaan

Ilmu yang mempelajari ilmu kekuasaan dalam masyarakat yaitu sifat, hakikat, dasar, proses, ruang lingkup dan hasil dari kekuasaan itu.

3. Aspek kekuatan politik

Ilmu yang mempelajari kelakuan politik dalam sistem politik yang meliputi budaya politik, kekuasaan, kepentingan dan kebijakan.

D. Konsep-konsep dalam Ilmu Politik

Konsep-konsep yang dipelajari dalam ilmu politik diantaranya ialah:

1. Negara (*state*)
2. Kekuasaan (*power*)
3. Pengambilan keputusan (*decision making*)
4. Kebijakan umum (*policy, beleid*)
5. Pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*)¹⁴

Berikut akan di bahas satu-per satu mengenai konsep-konsep yang di pelajari dalam ilmu politik:

a. Negara (State)

Negara dalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh warganya.¹⁵ Suatu negara dapat dipandang dari 2 sisi, yaitu : pandangan yuridis yang digunakan untuk menyelidiki negara sebagai bangunan hukum, sementara pandangan sosiologisdigunkan untuk menyelidiki negara sebagai bangunan atau kenyataan masyarakat.¹⁶dan Para sarjana ilmu politik

¹⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, h. 8-9.

¹⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*.,, h. 17.

¹⁶ Asep Sahid Gatara dan Subhan Sofhian, *Pendidikan*, (Bandung: Fokusmedia, 2012) h. 56.

menekankan negara sebagai inti dari politik (*politics*), memustkan perhatiannya pada lembaga-lembaga kenegaraan serta bentuk formalnya. Definisi ini bersifat tradisional dan agak sempit ruang lingkupnya. Pendekatan ini dinamakan Pendekatan Institusional (*Institutional Approach*).

b. *Kekuasaan (Power)*

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan pelakunya.¹⁷ Sarjana yang melihat kekuasaan inti dsri politik beranggapan bahwa politik adalah semua kegiatan yang menyangkut masalah memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Biasanya dianggap bahwa perjuangan kekuasaan (*power struggle*) ini mempunyai tujuan yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat.

c. *Pengambilan Keputusan (Decision Making)*

Pengambilan keputusan dalah membuat pilihan diantara beberapa alternatif.¹⁸ Sedangkan istilah pengambilan keputusan menunjukan pada proses yang terjadi sampai keputusan itu

¹⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*,, h. 18.

¹⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar ilmu Politik*,, h. 19.

terjadi. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif mengikat seluruh masyarakat.

Pembuatan keputusan menggambarkan proses melalui mana serangkaian kegiatan dipilih sebagai penyelesaian suatu masalah tertentu. George P. Huber membedakan pembuatan keputusan dari pembuatan pilihan (*choice making*) dan pemecahan masalah (*problem solving*).¹⁹

d. Kebijakan Umum (*Policy, beleid*)

Kebijakan umum adalah kumpulan keputusan yang diambil seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu.²⁰ Setiap masyarakat mempunyai beberapa tujuan bersama. Cita-cita bersama ini ingin dicapai melalui usaha bersama, untuk itu perlu ditentukan rencana-rencana yang mengikat yang dituang dalam kebijakan (*Policies*) oleh pihak yang berwenang yakni pemerintah. Perumusan kebijaksanaan juga harus meliputi usaha untuk memproyektir kenyataan-

¹⁹ T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta : Bpfe-Yogyakarta, 2011) h. 130.

²⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*,, h. 20.

kenyataan sekarang dalam keadaan-keadaan nanti/masa depan, dengan cara melakukan fikiran dari perkembangan yang mungkin terjadi dan dalam penyusunan berbagai alternatif langkah kegiatan yang mungkin dilalui.²¹

e. Pembagian (*Distribution*) atau alokasi (*Allocation*)

Pembagian atau alokasi ialah pembagian dan penjabaran nilai-nilai dalam masyarakat, yang ditekankan bahwa pembagian selalu tidak merata dan menimbulkan konflik.²²

Dalam ilmu sosial, suatu nilai (*value*) adalah sesuatu yang dianggap baik dan benar, sesuatu yang diinginkan, yang mempunyai harga. Nilai ini dapat bersifat abstrak seperti penilaian (*judgement*) atau suatu asas seperti kejujuran, dan kebebasan berpendapat. Nilai juga bisa bersifat konkret (*material*) seperti rumah, kekayaan dan sebagainya.

E. Perkembangan Ilmu Politik

Ilmu politik merupakan salah satu ilmu tertua dari berbagai cabang ilmu yang ada. Meskipun beberapa cabang ilmu pengetahuan

²¹ Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: Lp3es, 1974) h.3.

²² Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*,, h. 21.

yang ada telah mencoba melacak asal-usul keberadaannya hingga zaman Yunani kuno, tetapi hasil yang dicapai tidak segemilang apa yang telah dicapai oleh ilmu politik.

Tetapi pada masa selanjutnya, ilmu politik berfokus pada masalah kelembagaan dan pendekatan yang digunakan sepanjang masa itu bersifat historis, dalam pengertian bahwa para pemikir politik lebih memusatkan perhatiannya pada upaya melacak serta menggambarkan berbagai fenomena politik yang ada, atau pada perkembangan lembaga politik yang bersifat khusus, daripada menganalisa fenomena serta lembaga-lembaga tersebut, serta melibatkan diri dengan elemen-elemen yang bersifat abstrak²³. Ilmu politik masih merupakan suatu disiplin yang hanya dapat dipelajari di perpustakaan atau ruang belajar daripada di lapangan, dimana interaksi-interaksi politik yang sebenarnya terjadi.

Tetapi pada tahun terakhir abad ke-19, mulai muncul suatu kesadaran dalam diri beberapa pemikir politik bahwa dalam upaya mendapatkan apa yang diinginkan dan yang dianggap ideal, mereka belum memberikan perhatian yang memadai dalam memahami serta menganalisa berbagai lembaga politik pemerintahan sebagaimana

²³ SP. Varma, *Teori Politik Modern*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 4.

sebenarnya berjalan.²⁴ Antara abad keenam belas sampai awal abad kedua puluh, “politik” diartikan secara lebih sempit dibandingkan dengan pengertian yang dipahami orang-orang Yunani, Jean Bodin (1530-1596).

Seorang filosof politik Prancis, memperkenalkan istilah “ilmu politik” (*science politique*). Definisi tentang politik yang lebih formal dan terbatas ini diperkukuh oleh filosof Prancis lainnya, yaitu Montesquieu (1689-1755), yang mengemukakan bahwa semua fungsi pemerintahan dapat dimasukkan dalam kategori legislatif, eksekutif, dan yudikatif²⁵. Berdasarkan perspektif ini bisa dipahami bahwa para ahli ilmu politik akan memusatkan perhatian, semata-mata dan sampai pada sekarang ini, pada organisasi dan sistem kerja lembaga-lembaga yang membuat undang-undang, yang melaksanakannya, dan yang menampung pertentangan yang timbul dari kepentingan yang berbeda dan bermacam-macam penafsiran tentang undang-undang.

Politik adalah kenegaraan, ilmu ketatanegaraan, pemerintahan, siasat, tipu muslihat, kelicikan, daya upaya, kebijakan, kegiatan dan interaksi manusia yang berkenaan dengan proses pembuatan dan

²⁴ M. Zainor Ridho, *Pengantar Ilmu Politik*, (Serang: LP2M IAIN SMH Banten, 2015), h. 3-4

²⁵ SP. Varma, *Teori Politik Modern*, h. 3

pelaksanaan keputusan yang mengikat untuk masyarakat umum²⁶. Politik berarti segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat, dsb) mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain²⁷. Apabila ilmu politik dipandang semata-mata sebagai salah satu dari ilmu-ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang jelas, maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya karena baru lahir pada akhir abad ke-19. Pada tahap itu ilmu politik berkembang secara pesat berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, antropologi, ekonomi dan psikologi, dan dalam perkembangan ini mereka saling mempengaruhi.

Akan tetapi apabila ilmu politik ditinjau dalam rangka yang lebih luas, yakni sebagai pembahasan secara rasional dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik dapat dikatakan jauh lebih tua umurnya. Bahkan sering dikatakan ilmu sosial tertua di dunia karena dalam perkembangannya banyak bersandar pada sejarah dan filsafat²⁸. Perkembangan ilmu politik juga disebabkan oleh dorongan kuat beberapa badan internasional, seperti UNESCO. Karena adanya

²⁶ H.S, Kartoredjo, *Kamus Baru Kontemporer*, (Bandung: Rosdakarya, 2014), h. 290.

²⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), h. 905.

²⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, h. 5.

perbedaan dalam metodologi dan terminologi dalam ilmu politik, maka UNESCO pada tahun 1948 melakukan survei mengenai ilmu politik di kira-kira 30 negara. Kemudian, proyek ini dibahas beberapa ahli di Prancis, dan menghasilkan buku *Contemporary Political Science* pada tahun 1948. Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (*public goals*), dan bukan tujuan pribadi seseorang (*private goals*). Setelah perang dunia ke II perkembangan ilmu politik semakin pesat di Indonesia misalnya didirikan fakultas-fakultas yang mempelajari masalah-masalah politik. Sedangkan di Negara-negara Eropa timur perkembangan ilmu politik masih menggunakan segi sejarah, filsafat, dan yuridis.”²⁹ Ilmu politik Baru mendapatkan identitasnya setelah didirikannya “*School of Political Science*” di Columbia pada tahun 1880, atas prakarsa John. W. Burges, dan ia sendiri yang memimpinya.

Pada tahun 1886 sekolah tersebut menerbitkan the *Political Science Quarterly* yang menjadi saluran pertama menulis karyanya. Pada saat itu lah berdiri berbagai macam institute-institut atau pun sekolah-sekolah yang mengajarkan ilmu politik dan mengenai

²⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, h. 1.

politik lebih mendalam, para ahlipun menganalisa menyangkut segala sesuatu yang berkaitan dengan Negara³⁰ Pada akhir abad ke 19 ilmu politik mengukuhkan dirinya sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri dengan berbagai sumbangan besar yang diberikan oleh para sarjana politik untuk lebih mengetahui politik itu sendiri dan memberikan informasi serta fakta-fakta yang terkuak saat melakukan penelitian tentang sejarah politik. Pada permulaan abad ke 20 Gettell menunjukkan ilmu politik mulai dipengarui oleh kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam beberapa tahap penelitian. Dimana metode-metode modern menunjukkan sesuatu kecenderungan berbeda dalam observasi, survey, dan pengukuran yang berbeda³¹ Reaksi post-behavioralisme merupakan gerakan yang timbul di Amerika pada pertengahan dekade enam puluhan.

Pokok-pokok reaksi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam usaha mengadakan penelitian yang empiris dan kuantitatif ilmu politik menjadi terlalu abstrak dan tidak relevan terhadap masalah social yang di hadapi. Padahal relevance dianggap lebih penting daripada penelitian yang cermat.

³⁰ SP, Varma. *Modern Political Theories*. Terj: *Teori Politikal Modern* (Jakarta: Rajawali Press) h. 4-7.

³¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, h.15.

2. Penelitian mengenai nilai-nilai harus merupakan tugas ilmu politik.
3. Para cendekiawan mempunyai tugas yang histories dan unik untuk melibatkan diri dalam usaha mengatasi masalah-masalah social. Pengetahuan membawa tanggung jawab untuk bertindak, harus “engage” atau ‘*committet*’ untuk mencari jalan keluar dari krisis yang dihadapi.”³²

Pada masa-masa berikutnya ilmu-ilmu sosial banyak memanfaatkan penemuan-penemuan dari antropologi, sosiologi, psikologi, dan ekonomi, dan dengan demikian ilmu politik dapat meningkatkan mutunya dengan banyak mengambil model dari cabang ilmu sosial lainnya. Berkat hal ini, wajah ilmu politik telah banyak berubah dan ilmu politik menjadi ilmu yang penting dipelajari untuk mengerti tentang politik³³. Dalam kehidupan dimana perdagangan atau kegiatan jual beli dipasar yang dilakukan dalam keseharian merupakan suatu kegiatan politik. Yang tanpa disadari disana terjadi istilah tawar-menawar barang yang dimana seseorang dapat menawar barang atau saling mendesak dan membuat strategi-strategi yang dapat menjadi keuntungan bagi mereka. Disinilah dapat melihat dimana ilmu politik

³² Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, h. 4-8.

³³ Isjwara. F, S.H, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung: Bina Cipta, 1992) h.

tidak hanya dapat terjadi antara kelompok atau Negara, tetapi juga terjadi antar individu-individu yang memiliki kepentingan masing-masing. Ilmu politik juga dapat terjadi di segala aspek masyarakat yang ada disuatu Negara.

Ilmu politik masa kini telah berkembang dari berbagai bidang studi yang berkaitan, termasuk sejarah, filsafat, hukum, dan ekonomi. Ilmu politik yang dahulu menjadi bagian dari berbagai disiplin tersebut, akhirnya sampai pada tujuan dimana ia dapat menyatakan kebebasannya, sebagaimana halnya bidang studi lainnya yang telah lebih dahulu membebaskan dirinya dari filsafat dan agama. Tetapi meskipun ilmu politik baru saja berkembang sebagai suatu bidang studi khusus, studi teoritis dan praktek tentang menyusun Negara dan politik telah mulai sekurang-kurangnya pada masa orang-orang Yunani kuno (kurang lebih 500-300 S.M).³⁴ Perkembangan ilmu politik setelah Perang Dunia II berkembang lebih pesat, misalnya di Amsterdam, Belanda didirikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, walaupun penelitian tentang negara di Belanda masih didominasi oleh Fakultas Hukum. Di negara-negara Eropa Timur, pendekatan tradisional dari

³⁴ Carlton Clymer Rodee, dkk, *Introduction to Political Science*, diterjemahkan oleh Zulkifly Hamid, *Pengantar Ilmu Politik*, cet. Ke-5, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002). h. 6.

segi sejarah, filsafat, dan hukum masih berlaku hingga saat ini. Sesudah keruntuhan komunisme, ilmu politik berkembang pesat, bisa dilihat dengan ditambahkan pendekatan-pendekatan yang tengah berkembang di negara-negara barat pada pendekatan tradisional.

Pada masa-masa berikutnya ilmu-ilmu sosial banyak memanfaatkan penemuan-penemuan dari antropologi, sosiologi, psikologi, dan ekonomi, dan dengan demikian ilmu politik dapat meningkatkan mutunya dengan banyak mengambil model dari cabang ilmu sosial lainnya. Berkat hal ini, wajah ilmu politik telah banyak berubah dan ilmu politik menjadi ilmu yang penting dipelajari untuk mengerti tentang politik³⁵.

F. Tokoh-tokoh Ilmu Politik

1. Nicollo Machiavelli

Nicollo Machiavelii (1469-1527), dialah tokoh yang merasa jemu dengan pertenggaran-pertenggaran doktrin³⁶. Teori politik dari Nicollo Machiavelli adalah berkaitan dengan teori politik kekuasaan. Dalam buku *The Prince*, ia memberikan nasihat tentang

³⁵ Pendidikan Riau, Definisi Ilmu Politik dan Sejarah Perkembangannya, Riau: <http://sospol.pendidikanriau.com> diakses pada tanggal 04April 2018.

³⁶ Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*,, h. 526.

bagaimana mendapatkan dan mempertahankan sebuah kepangeranan.

2. *Jean Jacques Rousseau*

Jean Jacques Rousseau (1712-1778), seorang pengarang, filsuf politik, dan komponis perancis yang hijrah ke Genewa³⁷. Teori politik Rousseau adalah mengenai kontrak sosial, dapat kita lihat pada bukunya *Du Contrat Social* (Perjanjian Sosial). Konsep pertama Rousseau tentang negara adalah hukum (*law*). Rousseau menyebut setiap negara yang diperintah oleh hukum dengan Republik, entah bagaimanapun bentuk administrasinya. Selanjutnya, badan legislatif (*the legislator*) yang “maha tahu” membuat dasar aturan/ hukum namun sama sekali tidak memiliki kekuasaan memerintah orang. Menurutnya, kekuasaan legislatif harus di tangan rakyat sedang eksekutif harus berdasar pada kemauan bersama. Rakyat seluruhnya, dianggap sejajar dengan penguasa manapun, mengadakan sidang secara periodik dan ini meminggirkan fungsi eksekutif. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat yang seperti ini sulit terjadi pada kota yang sangat besar.

³⁷ Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*,, h. 532.